

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
TAHUN 2020  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan atau monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam laporan Rencana Tindak Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi kongkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pesisir Selatan

DAILIPAL, S.Sos.M.Si  
NIP. 19680805 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
II. SEKILAS TENTANG SPIP.....	3
A. Pengertian.....	3
B. Tujuan SPIP.....	4
C. Unsur- unsur SPIP.....	4
D. Pernyataan Tanggungjawab.....	7
III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan.....	8
A. Tujuan Penciptaan lingkungan Pengendalian yang baik.....	8
B. Kondisi lingkungan Pengendalian saat ini.....	9
C. Rencana Perbaikan lingkungan pengendalian.....	11
IV. RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN.....	14
A. Pernyataan Tujuan.....	14
B. Risiko- risiko.....	15
C. Pengendalian Terpasang.....	16
D. Pengendalian yang masih dibutuhkan.....	18
V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	19
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	20
VII. PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

#### D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

## II. SEKILAS TENTANG SPIP

### A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPIP di atas dipahami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara

menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

#### B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

#### C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

##### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan

prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian

merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

#### 5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

#### D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

### III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur - unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai - nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan (1 Sekretariat dan 2 Kepala Bidang) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

### C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

		aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang

		diberikan terkait dengan pihak lain di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD.

#### IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

##### A. Pernyataan Tujuan

1. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2016, rencana tindak pengendalian yang disusun Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan di prioritaskan untuk Pembangunan Pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 2). Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
- 3). menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
- 4). Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

#### B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Belum tercapainya keamanan wisata yang akurat
- Kurangnya terpenuhinya patroli di beberapa aspek
- Belum tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman serta honor non PNS
- Belum wujudnya tenaga bantuan satpolPP
- Belum terlaksananya Perda secara baik
- Belum tercapainya resiko gangguan trantibum masyarakat
- Kurang optimalnya kegiatan kemah bhakt Satpol PP
- Dapat mengurangi Resiko Gangguan Trantibum
- Kurang Terpeuhinya Pengamanan di Beberapa aspek
- Belum Tercapainya resiko gangguan trantibum Masyarakat

- Belum tercapainya keamanan objek wisata yang nyaman

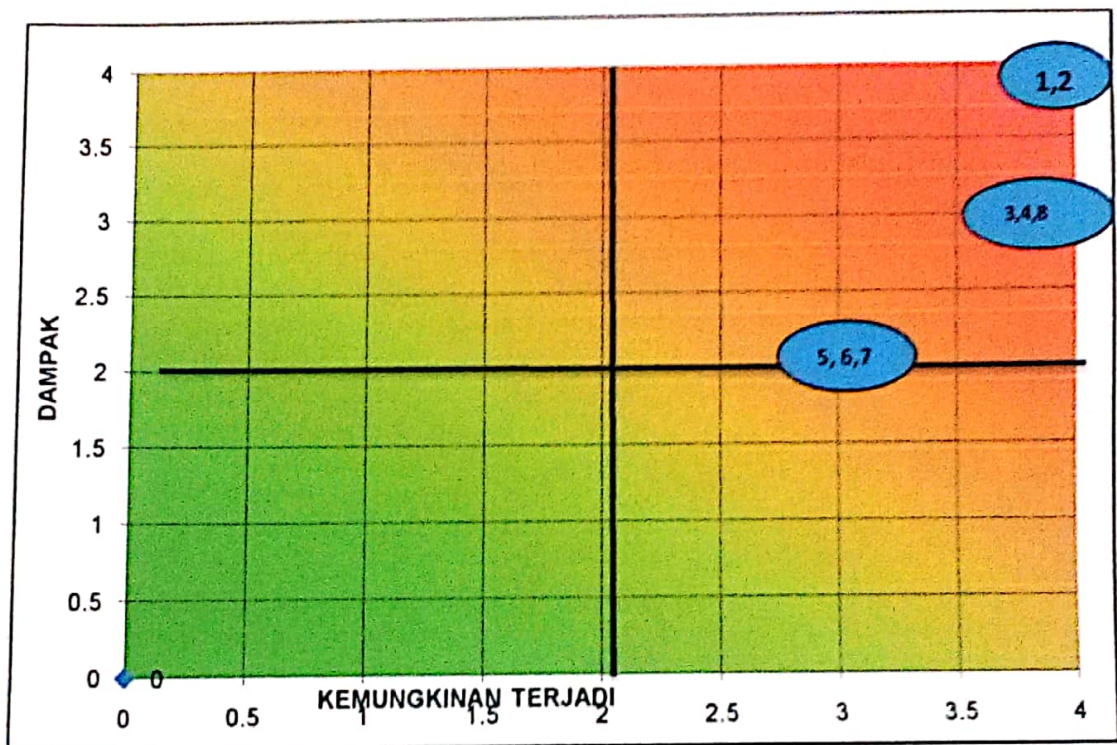
Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Kurangnya armada dan anggota pemadam kebakaran

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- Belum Optimalnya sosialisasi tentang bahaya kebakaran kepada masyarakat

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

#### ☛ Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa

pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pengendalian terpasang
1.	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberian bimbingan dan pengarahan bagi personil yang dilakukan patroli
2.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Ketersediaan anggaran makanan dan minuman bagi anggota Non PNS (piket)
3.	Forum Penegak Perda	Memberikan pemahaman tentang perda kepada masyarakat
4.	Operasional Pengamanan Invent- ivent Tertentu	Memberikan bimbingan kepada anggota agar pengamanan dilapangan berjalan baik
		Pembinaan kepada anggota dalam pengamanan
		Memberikan bimbingan kepada anggota agar pengamanan dilapangan berjalan lancar
5.	Operasional Pemadam Kebaran	Dengan keterbatasan anggota maka kegiatan operasional kurang baik

## D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

No	Tujuan	Pengendalian yg masih dibutuhkan
1.	Terlaksananya patroli wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.	Kerjasama antara petugas dengan pemandu wisata dan aparaturnya lainnya
2.	Terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	Kerjasama antara petugas dan lingkungan masyarakat
3.	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD
4.	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketersediaan anggaran untuk penambahan Personil atau anggota
5.	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rakor penegak perda
6.	Terlaksananya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Balimau Paga	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD
7.	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota
8.	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the singkarak tahun 2020	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota

9.	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD
10.	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Pelatihan Anggota dan ketersediaan dana
11.	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Penambahan Armada Pemadam Kebakaran

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

## V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

No.	Kegiatan	Bentuk/ sarana komunikasi
1.	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Surat Edaran
2.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Surat Edaran
3.	Forum Penegak Perda	Telepon / Surat Tugas
4.	Operasional Balimau Paga	Telepon / Surat Tugas
5.	Operasional Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau	Telepon / Surat Tugas
6.	Operasi PAM Lebaran	Telepon / Surat Tugas
7.	Operasional Pemadam Kebaran	SK/ Surat Tugas

## VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

### 1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala atau Sekretaris pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

## 2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif

### 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

### 4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

## VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

## IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

**Visi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. PESSEL**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Terlaksananya operasi wilayah dan operasi rutin sesuai dengan standar aturan yang berlaku.	Operasi penegakan Perda dan Perkada Serta Tegaknya Peraturan Daerah dan Produk Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan	Kegiatan Forum Penegak Perda dan Kegiatan Penerbitan Pelanggaran Peraturan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Perda
2	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran	Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum
3			Kebutuhan Personil / Anggota yang piket pada Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, kantor dll	Kegiatan Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan Aset Negara
4		Terlaksananya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Balimau Paga	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent-Ivent Tertentu
5		Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Dilapangan	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent-Ivent Tertentu
6		Terlaksananya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Tour The Singkarak	Terciptanya ketentrama, kenyamanan dan ketertiban lokasi	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent-Ivent Tertentu
7		Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Terciptanya Ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat di 7 titik rawan gangguan tranibum pada H-2 sd H+2 lebaran	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent-Ivent Tertentu
8		Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Mewujudkan Mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif	Operasional Pemadam Kebakaran

### Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasn dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Forum Penegak Perda dan Kegiatan Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggaran Perda	Operasi penegakan Perda dan Perkada Serta Tegaknya Peraturan Daerah dan Produk Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan	Selaras	
2	Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum	Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Selaras	
3	Kegiatan Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan Aset Negara	Terselenggaranya pengamanan aset-aset negara	Selaras	
4	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent- Ivent Tertentu	Terselenggaranya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Balimau Paga	Selaras	
5	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent- Ivent Tertentu	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Selaras	
6	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent- Ivent Tertentu	Terselenggaranya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Tour The Singkarak	Selaras	
7	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent- Ivent Tertentu	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Selaras	
8	Operasional Pemadam Kebakaran	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Selaras	

**Catatan:**

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penllalan risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penllalan risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)

# IDENTIFIKASI RISIKO

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

SKPD

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	Forum Penegak Perda	2	3	4	5	6
1	Forum Penegak Perda	Tertindakannya Koordinator Forum Penegak Perda	Belum Terlaksananya Perda Secara Baik	Bidang Forum Penegak Perda	Kurangnya Saranan dan Anggaran	Terlaksananya Penegak Peraturan Hukum
2	Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	Tertiptanya lingkungan terrib, aman dan nyaman	Kurang terpenuhinya Patroli di beberapa Aspek	Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum	Rendahnya SDM Personil dan Pemahaman Masyarakat tentang Keamanan Lingkungan	terpenuhinya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan tingkat SDM personil yang memadai
3	Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan Aset Negara	Tertindakannya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Belum tercurupi Kebunihan Makanan dan Minuman serta Honor Non PNS	Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum	Keterbatasan Anggaran Makan dan Minum Non PNS	Terwujudnya Pengamanan Aset Daerah
4	Kegiatan Operasi Pengamanan Ivent-ivent Tersebut	Tertindakannya Ketertarikan, Kenyamanan, Pengamanan Acara Balimai Paga	Belum Tercapainya resiko gangguan terhadap masyarakat	Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Tercapainya Keamanan, ketertarikan dan kenyamanan Masyarakat
		Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Dapat Mengurangi Resiko Gangguan Terhadap	Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kurangnya SDM personil dan Keterbatasan Dana	terlaksananya Kegiatan Festival Lapangan Jawa Tengah di bulan
		Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the Pengamanan di beberapa Aspek singkarak		Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kurangnya Personil Pengamanan di Lapangan serta Anggaran yang tersedia	terlaksananya ketertarikan, kenyamanan dan ketertarikan
		Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Belum Tercapainya resiko gangguan terhadap masyarakat	Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terlaksananya Keamanan, ketertarikan dan kenyamanan Masyarakat
5	Operasional Pemadam Kebakaran	Memenuhi pramus kegiatan Masyarakat	Belum Optimalnya resudisasi tentang bahaya kebakaran kepada Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Bahaya Kebakaran	Capaian pengembang kegiatan dan ketertarikan

Ket

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menanggapi risiko tersebut
- 5 menyebabkan terjadinya
- 6 Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

# ANALISIS RISIKO

SKPD. SATUAN POLISI PAONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

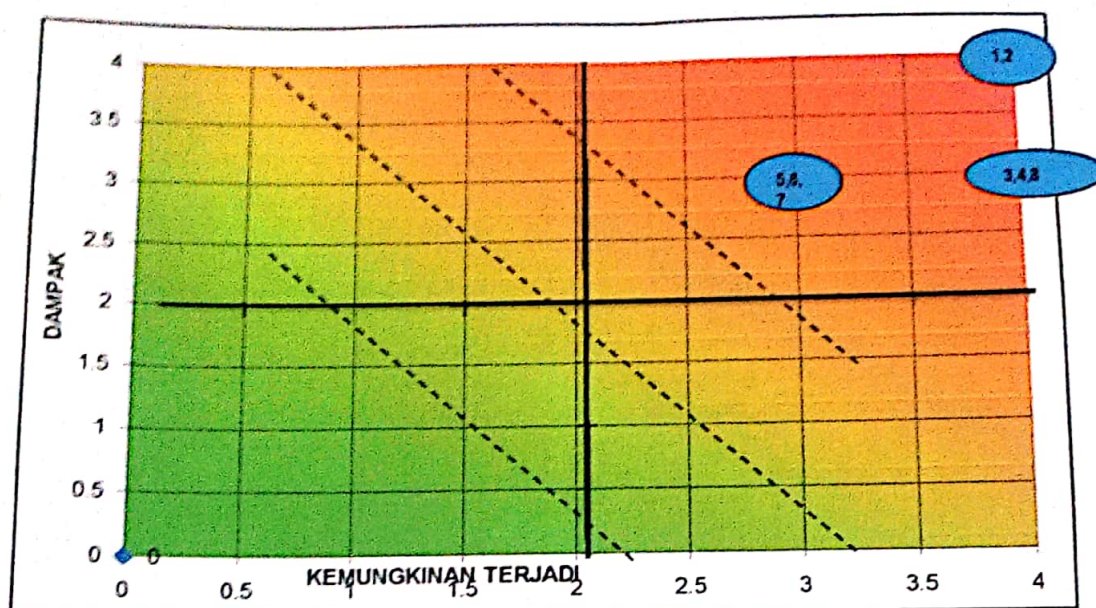
No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Belum Terlaksananya Perda Secara Baik	Bidang Forum Penegak Perda	Kurangnya Saranan dan Anggaran	Terlaksananya Penegak Peraturan Hukum	4,00	4,00	16,00
2	Terciptanya lingkungan terrib, aman dan nyaman	Kurang terpenuhinya Patroli di beberapa Aspek	Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Rendahnya SDM Personil Pengamanan dan Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang Keamanan Lingkungan	terpenuhnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan tingkat SDM personil yang memadai	4,00	4,00	16,00
3	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Belum tercapai Kebersihan Makanan dan Minuman serta Hooter Non PNS	Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Keterbatasan Anggaran Makan dan Minum Non PNS	Terwujudnya Pengamanan Aset Daerah	4,00	3,00	12,00
4	Terlaksananya Ketertarikan, Kenyamanan, Pengamanan Acara Balimor Paga	Belum Terciptanya resiko gangguan timbul masyarakat	Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terwujudnya Ketertarikan, ketertarikan dan Kenyamanan Masyarakat	4,00	3,00	12,00
5	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertarikan Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Dapat Mengurangi Resiko Gangguan Iradibum	Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Kurangnya SDM personil dan Keterlibatan Dima	terlaksananya Kegiatan Festival Lapangan Sesuai Amanat Tujuan	3,00	3,00	9,00
6	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertarikan Umum pada peserta Tour the singarak	Kurang terpenuhinya Pengamanan di beberapa Aspek	Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Kurangnya Personil Pengamanan di Lapangan serta Anggaran yang tersedia	Terwujudnya ketertarikan, kenyamanan dan ketertarikan Iokasi	3,00	3,00	9,00
7	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertarikan Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Belum Terciptanya resiko gangguan timbul masyarakat	Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terciptanya Keamanan, ketertarikan dan Kenyamanan Masyarakat	3,00	3,00	9,00
8	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Belum Optimalnya sosialisasi tentang bahaya kebakaran kepada Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Bahaya Kebakaran	Dapat mengurangi kerugian dari kebakaran	4,00	3,00	12,00

Ket:

- 1 Kolom 1 berisi no unit
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- 4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
- 5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- 6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
- 7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
- 8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7



## PETA RISIKO



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

### RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

SKPD :

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Belum Terlaksananya Perda Secara Baik	Permasalahan pada Pihak Pemandu Wisata yang tidak sinkron dengan personil pengamanan	Pemberian Pengarahan Kepada Personil Patroli sebelum Pengamanan	Kurang Efektif	Kerjasama antara petugas dengan pemandu wisata dan aparaturnya lainnya	Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	1 tahun
2	Terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	Kurang terpenuhinya Patroli di beberapa Aspek	Penambahan SDM dan Personil Demi Kelancaran Kegiatan Pengamanan dan Ketertarikan serta Kenyamanan Bagi Masyarakat	Pemberian Bimbingan dan Pengarahan Bagi Personil yang melakukan Patroli	Kurang Efektif	Kerjasama antara petugas dan lingkungan masyarakat	Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	1 tahun
3	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Belum tercukupi Kebutuhan Makanan dan Minuman serta Honor Non PNS	Ketersediaan Anggaran untuk mencukupi Makanan dan Minuman Non PNS	Anggaran Makanan dan Minuman bagi Non PNS (piket) baru 2 kali makan	Kurang Efektif	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	1 Tahun
4	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Belum Terwujudnya Tenaga Bantuan Satpol PP	Penambahan SDM dan Personil Demi Kelancaran Pengamanan dan Ketertarikan bagi Masyarakat	Dengan keterbatasan Personil pengamanan dilapangan kurang efektif	Kurang Efektif	Ketersediaan anggaran untuk penambahan Personil atau anggota	Bidang Penegak Perda	1 Tahun
5	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Belum Terlaksananya Perda Secara Baik	Pelaksanaan Perda terhambat akibat kurangnya Koordinasi	Memberikan Pemahaman tentang perda kepada Masyarakat	Kurang Efektif	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rakor penegak perda	Bidang Penegak Perda	1 Tahun
6	Terlaksananya Ketertarikan, Kenyamanan dan Pengamanan Acara Balimau Paga	Belum Tercapainya resiko gangguan trantibum masyarakat	Penambahan SDM dan Personil Pengamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat	Memberikan Bimbingan Kepada Anggota agar pengamanan di lapangan berjalan dengan baik	Efektif	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	1 Tahun
7	Terikutinya Kemah Bhakti SatpolPP, Hut SatpolPP 2017	Kurang Optimalnya Kegiatan Kemah Bhakti SatpolPP	Pertunya ketersediaan peralatan, Sarana dan Prasarana untuk kegiatan Kemah	Kesiapan anggota dalam pelaksanaan Kemah Bhakti Satpol PP	Kurang Efektif	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	1 Tahun
8	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertarikan Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Dapat Mengurangi Resiko Gangguan Trantibum	Pertunya pengetahuan dan keramahan Anggota dalam pengamanan kegiatan Festival Langkisau	Pembinaan Kepada anggota kesiapan dalam Pengamanan	Efektif	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	1 Bulan

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
9	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the singkarak tahun 2017	Kurang terpenuhinya Pengamanan di beberapa Aspek	Perlunya pengetahuan dan keramahan Anggota dalam pengamanan kegiatan	Pembinaan Kepada anggota kesiapan dalam Pengamanan	Efektif	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1 Bulan
10	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Belum Tercapainya resiko gangguan trantibum masyarakat	Penambahan SDM dan Personil Pengamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat	Memberikan Bimbingan Kepada Anggota agar pengamanan di lapangan berjalan dengan baik	Efektif	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1 Bulan
11	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Kurangnya Armada dan Anggota pemadam Kebakaran	Penambahan Armada Pemadam Kebakaran di tiap Kecamatan	Sudah Adanya 1 Posko di kabupaten dan 3 posko di kecamatan dengan 73 orang anggota	Kurang Efektif	Perlunya Pelatihan Anggota dan ketersediaan dana	Bidang Pemadam Kebakaran	1 Tahun
12	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Belum Optimalnya sosialisasi tentang bahaya kebakaran kepada Masyarakat	Perlunya Melakukan Sosialisasi pada Masyarakat tentang Bahaya Kebakaran	dengan keterbatasan anggota kegiatan operasional pemadam berjalan lancar	Kurang Efektif	Perlunya Penambahan Armada Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	1 Tahun

- Ket:
- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
  - Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi
  - Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
  - Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada
  - Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
  - Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan
  - Kolom 7 Diisi dengan nama Penanggungjawab untuk pengendalian
  - Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SKPD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tertindakannya Koordinator Forum Penegak Perda	Kerjasama antara petugas dengan pemandu wisata dan aparaturnya lainnya	Surat Edaran	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
2	Terciptanya lingkungan terhidup, aman dan nyaman	Kerjasama antara petugas dan lingkungan masyarakat	Surat Edaran	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
3	Tertindakannya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon / Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
4	Tertindakannya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketersediaan anggaran untuk penambahan Personil atau anggota	Telepon / Surat Tugas	Bidang Forum Penegak Perda	Masyarakat	1 Tahun
5	Tertindakannya Koordinator Forum Penegak Perda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rakor penegak perda	Telepon / Surat Tugas	Bidang Forum Penegak Perda	Masyarakat	1 Tahun
6	Tertindakannya Ketentraman, Kenyamanan, Pengamanan Acara Bahari Paga	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon / Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
7	Terikannya Kemah Bhakti SatpolPP, Hur SatpolPP	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon / Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
8	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Telepon / Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Bulan
9	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour dan outbound	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Telepon / Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Bulan
10	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon / Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Bulan
11	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlu nya Pelatihan Anggota dan ketersediaan dana	SK/ Surat Tugas	Bidang Pemadam Kebakaran	Masyarakat	1 Tahun
12	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlu nya Penambahan Armada Pemadam Kebakaran	SK/ Surat Tugas	Bidang Pemadam Kebakaran	Masyarakat	1 Tahun

Keterangan:

- 1 Kolom 3 Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin diwujudkan
- 2 Kolom 4 Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti Laporan, Surat, Rapat, lainnya
- 3 Kolom 5 Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
- 4 Kolom 6 Diisi dengan saat tertentu, peristiwa musibatan/bulan/tahunan

### DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Kerjasama antara petugas dengan pemandu wisata dan aparatur lainnya	Belum Oleh atasan langsung/ APIP/ tim/ K husus	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan (atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 tahun	dapat diisi setelah dilakukan pemantauan, apabila masih terdapat kelemahan atau kekurangan dari kegiatan pengendalian terpantau
2	Terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	Kerjasama antara petugas dan lingkungan masyarakat	Belum Oleh atasan langsung/ APIP/ tim/ K husus			1 tahun	
3	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Belum Oleh atasan langsung/ APIP/ tim/ K husus			1 Tahun	
4	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketersediaan anggaran untuk penambahan Personil atau anggota	Belum Oleh atasan langsung/ APIP/ tim/ K husus			1 Tahun	
5	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rakor penegak perda	Belum Oleh atasan langsung/ APIP/ tim/ K husus			1 Tahun	
6	Terlaksananya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Balimai Paga	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Belum Oleh atasan langsung/ APIP/ tim/ K husus			1 Tahun	

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Terikutinya Kemah Bhakti SatpolPP, Hut SatpolPP	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Belum Oleh atasan langsung/APIP/tim/Khusus			1 Tahun	
8	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Belum Oleh atasan langsung/APIP/tim/Khusus			1 Bulan	
9	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the singkarak	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Belum Oleh atasan langsung/APIP/tim/Khusus			1 Bulan	
10	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Belum Oleh atasan langsung/APIP/tim/Khusus			1 Bulan	
11	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Pelatihan Anggota dan ketersediaan dana	Belum Oleh atasan langsung/APIP/tim/Khusus			1 Tahun	
12	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Penambahan Armada Pemadam Kebakaran	Belum Oleh atasan langsung/APIP/tim/Khusus			1 Tahun	

**Keterangan :**

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4. Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5. Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6. Kolom 6 Cukup jelas
7. Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut

## LAMPIRAN I

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	Pengendalian Intensitas dan disiplin	Mencegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan yang berlaku	Sekretaris	1 Tahun
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	1 Tahun
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan	Sekretaris	1 Tahun
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya	Sekretaris	1 Tahun
3.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan)	Sekretaris	1 Tahun
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	
4.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	1 Tahun
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	1 Tahun
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP	Sekretaris	1 Tahun
5.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai	Sekretaris	1 Tahun
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Pangan untuk menunjang kegiatan	Sekretaris	1 Tahun

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
6	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	1 Tahun
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	1 Tahun
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	1 Tahun
7.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD.	Sekretaris	1 Tahun

# DAFTAR RISIKO PRIORITAS

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya patroli wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.	Belum Tercapainya keamanan Wisata yang akurat	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kurangnya Personil Pengamanan di setiap sektor	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat di kawasan Wisata
2	Terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	Kurang terpenuhinya Patroli di beberapa Aspek	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Rendahnya SDM Personil Pengamanan dan Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang Keamaan Lingkungan	terpenuhinya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan tingkat SDM personil yang memadai
3	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Belum tercukupi Kebutuhan Makanan dan Minuman serta Honor Non PNS	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Keterbatasan Anggaran Makan dan Minum Non PNS	Terwujudnya Pengamanan Aset Daerah
4	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Belum Terwujudnya Tenaga Bantuan Satpol PP	Bidang Forum Penegak Perda	Kurangnya Personil Pengamanan di Lapangan serta Anggaran yang Tersedia	Terciptanya Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan penegak Perda
5	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Belum Terlaksananya Perda Secara Baik	Bidang Forum Penegak Perda	Kurangnya Saranan dan Anggaran	Terlaksananya Penegak Peranuran Hukum
6	Terlaksananya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Balimai Paga	Belum Tercapainya resiko gangguan tranubum masyarakat	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terciptanya Keamanan, ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat
7	Terikutinya Kemah Bhakti SatpolPP, Hut SatpolPP 2017	Kurang Optimalnya Kegiatan Kemah Bhakti SatpolPP	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kurangnya SDM personil dan Ketertarikan Dana	Terlaksananya Ketertarikan Pelaksanaan Kegiatan Ditujuannya

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6
8	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Dapat Mengurangi Resiko Gangguan Trantibum	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kurangnya SDm personil dan Ketersediaan Dana	terlaksananya Kegiatan Festival Langkisau Sesuai dengan Tujuan
9	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the singkarak tahun 2017	Kurang terpenuhinya Pengamanan di beberapa Aspek	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kurangnya Personil Pengamanan di Lapangan serta Anggaran yang Tersedia	Terciptanya ketentrama, kenyamanan dan ketertiban lokasi
10	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Belum Tercapainya resiko gangguan trantibum masyarakat	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terciptanya Keamanan, ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat
11	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Kurangnya Armada dan Anggota pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	Kurangnya SDM Anggota Pemadam dan Kelalaian dari si Pemilik pada Objek yang kebakaran	Terbantunya Masyarakat dalam penanganan Bahaya Kebakaran
12	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Belum Optimalnya sosialisasi tentang bahaya kebakaran kepada Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Bahaya Kebakaran	Dapat mengurangi kerugian dari kebakaran

## KEGIATAN PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Terlaksananya patroli wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.	Belum Tercapainya keamanan Wisata yang akurat	Kerjasama antara petugas dengan pemandu wisata dan aparaturnya lainnya	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 tahun
2	Terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	Kurang terpenuhinya Patroli di beberapa Aspek	Kerjasama antara petugas dan lingkungan masyarakat	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 tahun
3	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Belum tercukupi Kebutuhan Makanan dan Minuman serta Honor Non PNS	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 Tahun
4	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Belum Terwujudnya Tenaga Bantuan Satpol PP	Ketersediaan anggaran untuk penambahan Personil atau anggota	Bidang Penegak Perda	1 Tahun
5	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Belum Terlaksananya Perda Secara Baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rakor penegak perda	Bidang Penegak Perda	1 Tahun
6	Terlaksananya Ketentraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Balimau Paga	Belum Tercapainya resiko gangguan transtibum masyarakat	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 Tahun
7	Terikutinya Kemah Bhakti SatpolPP, Hut SatpolPP 2017	Kurang Optimalnya Kegiatan Kemah Bhakti SatpolPP	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 Tahun
8	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Dapat Mengurangi Resiko Gangguan Transtibum	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 Bulan
9	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the singkarak tahun 2017	Kurang terpenuhinya Pengamanan di beberapa Aspek	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 Bulan
10	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Belum Tercapainya resiko gangguan transtibum masyarakat	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Bidang Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat	1 Bulan
11	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Kurangnya Armada dan Anggota pemadam Kebakaran	Perlu nya Pelatihan Anggota dan ketersediaan dana	Bidang Pemadam Kebakaran	1 Tahun
12	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Belum Optimalnya sosialisasi tentang bahaya kebakaran kepada Masyarakat	Perlu nya Penambahan Armada Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	1 Tahun

## LAMPIRAN : IV

## SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

## INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	Terlaksananya patroli wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.	Kerjasama antara petugas dengan pemandu wisata dan aparaturnya lainnya	Surat Edaran	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
2	Terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	Kerjasama antara petugas dan lingkungan masyarakat	Surat Edaran	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
3	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon /Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
4	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketersediaan anggaran untuk penambahan Personil atau anggota	Telepon /Surat Tugas	Bidang Forum Penegak Perda	Masyarakat	1 Tahun
5	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rakor penegak perda	Telepon /Surat Tugas	Bidang Forum Penegak Perda	Masyarakat	1 Tahun
6	Terlaksananya Ketentraman, Kenyamanan, Pengamanan Acara Balimai Paga	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon /Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
7	Terikutinya Kemah Bhakti SatpolPP, Hut SatpolPP 2017	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon /Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun
8	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Telepon /Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Bulan
9	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the singkarak tahun 2017	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Telepon /Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Bulan
10	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Telepon /Surat Tugas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	1 Bulan
11	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Pelatihan Anggota dan ketersediaan dana	SK/ Surat Tugas	Bidang Pemadam Kebakaran	Masyarakat	1 Tahun
12	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Penambahan Armada Pemadam Kebakaran	SK/ Surat Tugas	Bidang Pemadam Kebakaran	Masyarakat	1 Tahun

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yang direncanakan	Bentuk /Metode Pemantauan yang diperlukan	Dilakukan Oleh	Waktu
1	2	3	5	6	7
1	Terlaksananya patroli wilayah dan patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.	Kerjasama antara petugas dengan pemandu wisata dan aparaturnya lainnya	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revid lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 tahun
2	Terciptanya lingkungan terib, aman dan nyaman	Kerjasama antara petugas dan lingkungan masyarakat	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revid lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 tahun
3	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revid lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Tahun
4	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketersediaan anggaran untuk penambahan Personil atau anggota	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revid lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Tahun

5	Terlaksananya Koordinator Forum Penegak Perda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rakor penegak perda	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Tahun
6	Terlaksananya Ketenraman, Kenyamanan Pengamanan Acara Balimai Paga	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Tahun
7	Terikutinya Kemah Bhakti SatpolPP, Hut SatpolPP 2017	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Tahun
8	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Bulan
9	Berkurangnya terjadi resiko gangguan ketertiban Umum pada peserta Tour the singkarak tahun 2017	Demi Kelancaran Pengamanan maka di perlukan Penambahan Anggota	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh APIP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Bulan

10	Berkurangnya terjadi resiko gangguan keertiban pada masyarakat melaksanakan aktivitas Umum yang	Kerjasama antara Tim Anggaran dengan OPD	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya oleh APiP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Bulan
11	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Pelatihan Anggota dan ketersediaan dana	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya oleh APiP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Tahun
12	Meminimalisir potensi kerugian Masyarakat Akibat Kebakaran	Perlunya Penambahan Armada Pemadam Kebakaran	Evaluasi pemantauan berkelanjutan	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung;  untuk Evaluasi Terpisah dan(atau) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya oleh APiP (Inspektorat/ BPK/ BPKP)	1 Tahun